

APPENDIX

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama : Intan Zahra Husnaul Aziza

Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/FH

NIM : 20140610019

Judul : LEGAL PROBLEM ON MINIMUM WAGE DETERMINATION IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

Dosen Pembimbing : Nasrullah, S.H., S. Ag., MCL.

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar 7%.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan



Laela Niswatu, S.I. Pust.

Yogyakarta, 2018-05-17
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al-Zein, S.Kom.I.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 6 Februari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1386/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala DISNAKERTRANS DIY

Di
Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 036/A 4-II/II/2018
Tanggal : 5 Februari 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"LEGAL PROBLEM ON MINIMUM WAGE DETERMINATION IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : INTAN ZAHRA HUSNAUL AZIZA
NIM : 20140610019
No. HP/Identitas : 081355428732/727103606960005
Prodi/Jurusan : Hukum/Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Fakultas/PT : Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Dinakertrans DIY, APINDO DIY, KSPSI DIY
Waktu Penelitian : 7 Februari 2018 s.d. 24 Februari 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman Telepon (0274) 885147, Faksimili (0274) 885036
Website : www.nakertrans.jogjaprov.go.id; Email : disnakertrans@jogjaprov.go.id
YOGYAKARTA
Kode Pos 55282

Yogyakarta, 15 April 2018

Nomor : 0707 04196
Lampiran : -
Perihal : Laporan Selesai Penelitian

Kepada Yth :
Ketua Program Studi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
di -

YOGYAKARTA.

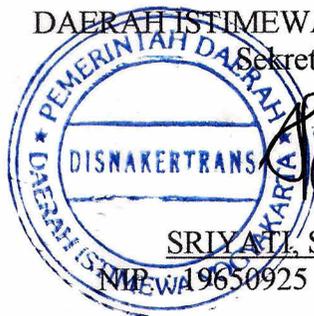
Sehubungan dengan Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas nama :

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	INTAN ZAHRA HUSNA'UL AZIZA	20140610019	Ilmu Hukum

Maka dengan ini kami sampaikan, bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah menyelesaikan Penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY pada tanggal 12 s/d 19 Februari 2018.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n KEPALA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Sekretaris



SRIYATI, S.Pd.MM

NIP. 19650925 198803 2 006.



DEWAN PIMPINAN PROPINSI D.I. YOGYAKARTA
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA
THE EMPLOYER'S ASSOCIATION OF INDONESIA

Sekretariat : Jl. Tanjung Tirta 34-36, Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571 Telp. 08112648844 Fax. (0274) 496226
Website : www.apindodiy.or.id E-mail : apindodiy@yahoo.co.id, diy@apindo.or.id

SURAT KETERANGAN

No. 012/A-DPP Apindo/DIY/IV/2018

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : FX. Supri Harsono, MM
Jabatan : Sekretaris DPP Apindo DIY (Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta)

Menerangkan bahwa,

Nama : Intan Zahra Husna'ul Aziza
NIM : 20140610019
Jurusan : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dalam rangka penulisan skripsi berjudul "**Legal Problem On Minimum Wage Determination in the Special Region of Yogyakarta,**" telah melakukan wawancara perihal '*peran pengusaha (Apindo DIY) dalam penetapan upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan tanggapan pengusaha atas diberlakukannya PP 78/2015 sebagai dasar hukum penetapan upah minimum*' dengan

Nama : Ibu Hermelien Yusuf, SH,
Jabatan : Wakil Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi DPP Apindo DIY
Pada : Senin, 19 Februari 2018

Demikian "Surat Keterangan" ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 April 2018
Dewan Pimpinan Provinsi
Asosiasi Pengusaha Indonesia
Daerah Istimewa Yogyakarta



FX. Supri Harsono, MM
Sekretaris



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(CONFEDERATION OF ALL INDONESIAN TRADE UNIONS)
(DPD KSPSI)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PENCATATAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA NO. 05/IV/PCT/L/2011

Alamat: Gedung Bumiputera Jl. Bintaran Wetan No. 11 Yogyakarta Email : dpdkspsi.diy@gmail.com

**SURAT KETERANGAN
No: 01/SK/DPD.SPSI/DIY/2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini mewakili Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa;

NAMA : INTAN ZAHRA HUSNA'UL AZIZA
NIM : 20140610019
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : *"Legal Problem on Minimum Wage Determination in the Special Region of Yogyakarta"*

Bahwa nama tersebut telah melakukan penelitian dan wawancara guna menyusun Skripsi pada tanggal 19 Februari 2018. Demikian surat keterangan ini kami buat untuk di jadikan perhatian.

Yogyakarta, 20 Februari 2018



KIRNADI
Wakil Ketua DPD K.SPSI DIY